

PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI MELALUI SOSIALISASI PERGUB NO. 55 TAHUN 2023 DAN REFRESHMENT CITIZEN SCIENCE DI SELAT ALAS

Lora Santika¹, Azwar Anas¹, Muslihuddin Ainib^{1,2}, Soraya Gigentika^{1,4},
Syaeful Bachri³, Wiwid Andriyani Lestariningsih^{*4}

¹Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi NTB

²Universitas Gunung Rinjani

³Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

⁴Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

Korespondensi: wiwid_lestariningsih@unram.ac.id

Artikel history :	Received	: 11 April 2026	DOI : https://doi.org/10.29303/pepadu.v7i2.10810
	Revised	: 27 Juni 2026	
	Published	: 30 Juni 2026	

ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Indonesia dengan produksi lebih dari 200.000 ton pada tahun 2021. Untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan (P2K2B) periode 2023–2028. Regulasi ini menekankan pentingnya pengelolaan perikanan berbasis ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan pengendalian penangkapan yang bertanggung jawab guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Salah satu upaya yang mendukung implementasi kebijakan tersebut adalah program Citizen Science yang melibatkan nelayan dalam pengumpulan data perikanan. Program ini telah berjalan di Selat Alas sejak tahun 2020 dan berkontribusi dalam penyediaan data untuk pengelolaan perikanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendataan secara sukarela. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, kegiatan sosialisasi Pergub No. 55 Tahun 2023 dan refreshment Citizen Science dilaksanakan pada 20–22 Mei 2024 di tiga desa di Lombok Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan sarana pendukung, penguatan kapasitas peserta, dan sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Citizen Science dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Selat Alas.

Kata kunci : Pengelolaan, Berkelanjutan, Citizen Science

ABSTRACT

The Province of West Nusa Tenggara (NTB) is one of Indonesia's major capture fisheries centers, producing more than 200,000 tons of fish in 2021. To support sustainable fisheries management, the Provincial Government of NTB enacted Governor Regulation No. 55 of 2023 concerning the Sustainable Grouper and Snapper Fisheries Management Action Plan (P2K2B) for the 2023–2028 period. This regulation emphasizes science-based fisheries management, community participation, and responsible fishing practices to ensure the long-term sustainability of fishery resources. One initiative supporting the implementation of this policy is the Citizen Science program, which involves fishers in fisheries data collection. The program has been implemented in the Alas Strait since 2020 and has contributed valuable data for fisheries management. However, several challenges remain, particularly in maintaining consistent voluntary participation from local communities in data collection activities. To enhance community understanding and engagement, a dissemination program on Governor Regulation No. 55 of 2023 and a Citizen Science refresher training were conducted from 20–22 May 2024 in three villages in East Lombok. The activities aimed to strengthen community capacity, improve awareness of sustainable fisheries management, and foster collaboration among government agencies, academics, and local communities. The results highlighted the importance of improving supporting facilities and infrastructure, strengthening participant capacity, and enhancing cross-sector collaboration to ensure the success of the Citizen Science program and sustainable fisheries management in the Alas Strait.

Keywords: *Sustainable, Management, Citizen Science*

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memegang peran penting dalam kontribusinya terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Menurut data statistik perikanan KKP, pada tahun 2021, Provinsi NTB berkontribusi terhadap produksi perikanan tangkap sebanyak lebih dari 200.000 ton, menandakan potensi besar yang dimilikinya di sektor perikanan. Sejalan dengan upaya untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya melalui penerapan Peraturan Gubernur Nomor. 55 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan (P2K2B) di Provinsi NTB untuk periode tahun 2023-2028.

P2K2B menetapkan strategi pemanfaatan (harvest strategy), termasuk kaidah pengendalian penangkapan (harvest control rules), dengan tujuan mewujudkan pengelolaan perikanan kerapu dan kakap yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif di NTB. Namun, untuk mencapai tujuan ini, penerapan peraturan saja tidak cukup. Penting untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang efektif tentang peraturan di dalamnya kepada masyarakat lokal, nelayan, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kelestarian sumber daya ikan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam siklus pengelolaan, monitoring dan evaluasi menjadi tahapan penting untuk mengoptimalkan penerapan peraturan. Sejak tahun 2018, Provinsi NTB telah menyelenggarakan lokakarya tahunan, khususnya untuk mengevaluasi capaian Rencana

Aksi P2K2B pada komoditas sumber daya ikan kerapu dan kakap. Data yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi kondisi stok perikanan diperoleh melalui kegiatan pemantauan pendaratan ikan, salah satunya dengan menerapkan skema citizen science.

Program Citizen Science merupakan salah satu kegiatan survei yang dilakukan untuk mengetahui pola pemanfaatan perikanan di suatu wilayah perairan. Menurut Yulianto et al., (2016), ketersediaan data dan informasi tentang sumber daya perikanan, habitat, kondisi sosial ekonomi, dan pola pemanfaatannya sangatlah penting sebagai dasar penyusunan kebijakan perikanan dan penyusunan perencanaan kegiatan/program dalam kerangka pengelolaan perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dapat dilakukan melalui suatu sistem informasi (Suhelmi et al., 2013). Informasi ini akan menjadi dasar dalam upaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sumber daya perairan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Apriliani et al., 2022). Program ini melibatkan peran aktif masyarakat nelayan dalam proses pendataan perikanan tangkap. Monitoring pendaratan ikan yang dilakukan di Selat Alas memberikan hasil kondisi dan status pemanfaatan perikanan di wilayah perairan tersebut yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Meskipun pengumpulan data dengan skema citizen science sudah dilakukan sejak tahun 2020, skema ini masih menghadapi hambatan seperti masyarakat yang kurang aktif, terutama jika tidak ada insentif dari pelaksana program, yang menyulitkan pengumpulan data yang bersifat sukarela. Hal inilah yang menyebabkan pengumpulan data yang dilakukan masyarakat dengan sukarela masih jauh dari harapan.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya pendataan perikanan serta dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program ini. Menurut Normina (2014), sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses pemahaman nilai, kebiasaan dan aturan antargenerasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sedangkan masyarakat secara etimologis berasal dari kata “socius” yang diambil dari bahasa Latin, yang artinya kawan (Sukarman et al., 2023). Oleh karena itu, sosialisasi kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, khususnya di tingkat pemerintah, nelayan, dan pelaku usaha perikanan. Upaya bersama melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan di Provinsi NTB serta diseminasi informasi mengenai kondisi stok perikanan kerapu dan kakap diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat nelayan maupun pelaku usaha terkait pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan refreshment skema citizen science perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan pemantauan pendaratan ikan (fish landing monitoring).

METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan (P2K2B) serta evaluasi program Citizen Science dilaksanakan pada tanggal 20–22 Mei 2024 di wilayah Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dilakukan dengan metode presentasi, sosialisasi, dan diskusi interaktif yang dilaksanakan secara roadshow di tiga desa lokasi pelaksanaan program Citizen Science, yaitu Desa Gunung Malang, Desa Labuhan Haji, dan Desa Tanjung Luar.

Peserta kegiatan terdiri atas nelayan pencatat data (citizen scientists), kelompok nelayan, perangkat desa, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan perikanan di kawasan Selat Alas. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi menggunakan media presentasi yang mencakup latar belakang, tujuan, serta rencana aksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya data perikanan dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta peran masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Evaluasi program Citizen Science dilakukan melalui pemaparan perkembangan program, penyampaian hasil pendataan yang telah dilakukan oleh nelayan, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Pada akhir sesi presentasi, dilakukan diskusi dan tanya jawab untuk memperoleh umpan balik dari peserta terkait efektivitas program, tingkat partisipasi masyarakat, serta kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan pendataan perikanan.

Data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan berupa tanggapan, masukan, serta hasil observasi terhadap pelaksanaan program kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta dan mengidentifikasi rekomendasi perbaikan dalam mendukung implementasi P2K2B serta penguatan program Citizen Science di wilayah Selat Alas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan (P2K2B) di Provinsi NTB, khususnya di wilayah Selat Alas, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta menyebarkan informasi kepada masyarakat, terutama nelayan dan pengepul, terkait regulasi terbaru dalam pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup agenda rutin dari Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B), yaitu Refreshment Pendataan Perikanan Berbasis Masyarakat (Citizen Science) di Selat Alas. Program Citizen Science ini melibatkan beberapa desa di Kabupaten Lombok Timur, antara lain Desa Gunung Malang, Desa Labuhan Haji, dan Desa Tanjung Luar.

Sosialisasi dan refreshment Citizen Science berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 20-22 Mei 2024 (Tabel 1). Kegiatan ini dilaksanakan dengan konsep roadshow, dengan mengunjungi desa-desa yang terlibat. Berikut adalah jadwal serta jumlah peserta dalam sosialisasi Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2023 dan refreshment Citizen Science di Selat Alas.

Tabel 1. Jadwal dan Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub No. 55 Tahun 2023 dan Evaluasi Citizen Science di Selat Alas

No	Hari, Tanggal	Waktu	Lokasi Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Senin, 20 Mei 2024	09.00 WIB	Desa Gunung Malang	14 orang
2.	Selasa, 21 Mei 2024	09.00 WIB	Desa Labuhan Haji	21 orang
3.	Rabu, 22 Mei 2024	09.00 WIB	Desa Tanjung Luar	22 orang

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2023 serta Refreshment Citizen Science di Selat Alas dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan nelayan,

pengepul, Kepala Desa, Penyuluh Perikanan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur, perwakilan DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Tim Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B) Provinsi NTB. Setiap sesi di desa-desa dilaksanakan dengan format yang seragam, diawali oleh pembukaan dari tim FIP2B, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari kepala desa serta penyuluh perikanan setempat. Setelah itu, FIP2B yang diwakili oleh Lora Santika, S.Pi., menyampaikan materi mengenai Pelatihan Penggunaan Aplikasi Kobotools/Kobocollect.

Aplikasi Kobocollect berfungsi untuk mengumpulkan data perikanan yang terhubung langsung dengan server Kobotools. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui Play Store. Pelatihan penggunaan aplikasi ini bagi masyarakat nelayan bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data lapangan, mendukung keterbukaan informasi, menjadi dasar kajian ilmiah, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan regulasi terkait perikanan dan kelautan. Pendekatan pendataan seperti ini sejalan dengan konsep participatory monitoring yang terbukti efektif meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan perikanan skala kecil (House et al., 2023; Fitriani dan Sahayati., 2023; Sari et al., 2023).

Materi yang disampaikan mencakup pentingnya pendataan perikanan di tingkat masyarakat, skema pendataan, serta pengenalan dan uji coba aplikasi Kobocollect oleh peserta. Partisipasi nelayan dalam pendataan juga relevan dengan praktik pemetaan pengetahuan lokal (Fishers' Ecological Knowledge) yang telah diterapkan dalam berbagai studi perikanan partisipatif (Nunes et al., 2021). Selain itu, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya terbukti mendukung tata kelola perikanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Karyaningsih et al., 2025; Aziz, 2025).

Pelatihan ini (Gambar 1) diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan nelayan (Alamsyah et al., 2026) dalam mendukung pengelolaan perikanan di perairan Provinsi NTB, membangun mekanisme pengumpulan data yang efektif (Pertiwi et al., 2020) dan efisien di Selat Alas, serta memperkuat ketersediaan data perikanan guna mendorong pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip ecosystem approach to fisheries management (EAFM) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam penyediaan data dan pengambilan keputusan (Ahmad et al., 2023).



Gambar 1. Pelatihan Aplikasi Kobocollect

Skema pendataan berbasis masyarakat yang diterapkan dalam sistem ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Nelayan mendaratkan hasil tangkapannya.
2. Nelayan mencatat hasil tangkapan menggunakan aplikasi Kobocollect atau logbook perikanan.
3. Data yang telah dicatat dikirim secara daring (online) oleh nelayan.
4. Bagi nelayan yang mengalami kendala jaringan internet atau menggunakan logbook perikanan, petugas akan membantu dalam proses pengiriman data.
5. Data perikanan yang masuk ke server akan melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.
6. Petugas dapat mengunduh data perikanan dari server Kobotoolbox untuk keperluan analisis dan pengelolaan lebih lanjut.

Agenda berikutnya adalah diseminasi mengenai kondisi stok perikanan kakap dan kerapu di Selat Alas (Gambar 2) yang disampaikan oleh perwakilan FIP2B, Muslihuddin Aini, S.Kel., M.Si. Materi yang dipaparkan mencakup pengenalan FIP2B NTB serta gambaran kondisi stok perikanan kakap dan kerapu di Selat Alas selama periode 2017 hingga 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih banyak ikan kakap dan kerapu yang tertangkap dalam ukuran kecil dan belum dewasa, dengan tren penurunan rata-rata panjang ikan dari tahun ke tahun. Selain itu, satu spesies kerapu berada dalam status fully exploited (kuning), sedangkan satu spesies kakap masuk dalam kategori over-exploited (merah), yang menandakan perlunya prioritas pengelolaan untuk memulihkan kondisi stok. Sementara itu, empat spesies kakap dan kerapu lainnya belum dapat dianalisis lebih lanjut akibat keterbatasan data yang tersedia.



Gambar 2. Diseminasi Kondisi Stok Perikanan Kerapu-Kakap di Selat Alas

Dari materi yang disampaikan diberikan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Stok kerapu-kakap NTB mengalami penurunan, sehingga perlu pengaturan alat tangkap.
2. Kolaborasi antarlembaga dan masyarakat terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kompresor.
3. Optimalisasi penangkapan ikan sesuai ukuran dan mata pancing sesuai regulasi.
4. Perlu dibuatkan awig-awig.
5. Kajian lebih lanjut terkait lokasi penangkapan ikan.

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi (Gambar 3) Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan (P2K2B) DI Provinsi NTB. Materi disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (Syaeful Bachri, S.Pi., M.Si.). Adapun isi materi sosialisasi yang disampaikan yaitu Pasal 12 tentang Penangkapan Ikan, Pasal 14 tentang Alat Tangkap, Pasal 16 tentang Perdagangan Ikan, dan Pasal 24 tentang Sanksi Administrasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengendalian penangkapan ikan kakap dan kerapu dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah serta kesepakatan dengan nelayan. Langkah-langkah kontrol tersebut meliputi penetapan ukuran tangkapan, pengaturan alat tangkap, pengaturan waktu penangkapan, dan regulasi perdagangan ikan. Hasil kajian ilmiah dan kesepakatan dengan nelayan dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan dan Pengendalian Penangkapan Ikan (RAP2K2B).
2. Bagian pertama dari peraturan ini menegaskan ukuran minimum penangkapan untuk berbagai jenis ikan kakap dan kerapu. Ikan seperti Kerapu Karet, Kakap Bunga Waru, Kerapu Bintik Merah, dan lainnya memiliki ukuran penangkapan minimum sebesar 300 gram, sementara jenis lain seperti Kerapu Minyak, Kerapu Sunu Halus, Kerapu Tikus, dan sejumlah lainnya memiliki ukuran minimum 500 gram. Bagian kedua, ketiga, dan keempat merinci aturan terkait alat tangkap yang digunakan, waktu penangkapan yang ditentukan oleh kesepakatan lokal, dan perdagangan ikan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.
3. Peraturan ini menjadi acuan bagi setiap orang dan pelaku usaha dalam kegiatan penangkapan ikan kakap dan kerapu, dengan tujuan utama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tersebut serta mengatur perdagangan agar sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan untuk menjaga populasi ikan kakap dan kerapu di perairan tersebut.
4. Sanksi administrasi yang akan diberikan apabila terdapat pelanggaran pasal-pasal tersebut adalah teguran, penghentian sementara kegiatan, pembekuan perizinan berusaha, denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.



Gambar 3. Sosialisasi Pergub No 55 Tahun 2023

Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dimana beberapa diskusi menghasilkan beberapa point diskusi diantaranya:

1. Pendataan Menggunakan Aplikasi Kobocollect: Meskipun masyarakat dan kelompok terkait telah mahir menggunakan aplikasi Kobocollect, terdapat kendala bagi nelayan yang tidak memiliki ponsel Android dan paket data. Disarankan untuk memberikan paket data bulanan kepada nelayan yang terlibat dalam pendataan agar proses ini dapat berjalan lancar.
2. Transplantasi Terumbu Karang: Mengingat banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan sesuai dengan Pergub 55 tentang perikanan berkelanjutan, diusulkan untuk melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang di daerah yang karangnya sudah rusak, seperti di sekitar Labuhan Haji. Diharapkan Dinas Perikanan provinsi dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk merealisasikan rencana ini.
3. Sarana dan Prasarana Patroli untuk Pokmaswas: Pokmaswas mengalami kendala dalam melakukan patroli karena kurangnya sarana seperti kapal operasional. Diharapkan ada tindakan konkret dari pihak terkait untuk menyediakan sarana tersebut sehingga pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan optimal.
4. Stabilitas Harga Ikan Ekspor: Pengumpul mengusulkan agar ada aturan yang menjamin stabilitas dan peningkatan harga ikan ekspor, terutama mengingat pelaksanaan Pergub 55 tahun 2023 yang mengatur ukuran tangkapan ikan.
5. Kajian Limbah Tambak: Limbah tambak yang mencemari laut menjadi perhatian utama karena berdampak pada penurunan populasi ikan dan perubahan warna air laut. Diperlukan kajian dan pengumpulan bukti yang akurat untuk memastikan dampak limbah tambak ini terhadap lingkungan dan populasi ikan. Hasil riset ini dapat dijadikan acuan untuk peraturan selanjutnya.
6. Pendataan Ikan Kecil dalam Jumlah Besar: Untuk ikan berukuran kecil yang jumlahnya banyak seperti ikan ketombong, disarankan untuk mengambil beberapa sampel dan memperkirakan jumlah totalnya. Pendataan dapat dilakukan dengan bantuan logbook bagi nelayan yang tidak memiliki ponsel Android, dan data tersebut akan dibantu pengirimannya atau diunggah oleh pendamping.
7. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Tambak: Dengan adanya bukti dampak negatif limbah tambak, disarankan untuk memasukkan pengelolaan limbah tambak dalam peraturan yang lebih ketat agar tidak merusak lingkungan laut dan mengurangi populasi ikan.

Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendataan, kelestarian terumbu karang, stabilitas harga ikan ekspor, dan pengelolaan lingkungan laut yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan (P2K2B) serta Refreshment Citizen Science telah dilaksanakan pada 20–22 Mei 2024 di Desa Gunung Malang, Desa Labuhan Haji, dan Desa Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan perikanan berkelanjutan serta memperkuat kembali kapasitas peserta dalam penggunaan aplikasi KoboCollect untuk

pendataan perikanan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program Citizen Science masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pendukung, kemampuan penggunaan aplikasi, serta perlunya penguatan aturan lokal dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Saran

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam pengumpulan data perikanan.
2. Dukungan sarana dan prasarana, khususnya perangkat telepon pintar, perlu ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan Citizen Science.
3. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan program dan implementasi P2K2B di Selat Alas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha, tim FIP2B, dan pemerintah yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi Pergub No. 55 Tahun 2023 tentang pengelolaan perikanan kerapu dan kakap berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. K., Mulyani, S., & Salsabilla, N. S. (2026). Penguatan Kapasitas Nelayan melalui Pelatihan Penentuan Zona Tangkap Dan Konservasi Laut Di Pantai Komodo. *Jurnal Abdimas PHB*, 9(1), 9–15.
- Apriliani, I. M., Rizal, A., Dewanti, L. P., Putra, P. (2022). Edukasi Pengukuran Dimensi Utama Kapal Penangkap Ikan Guna Mendukung Pendataan Perikanan di Kabupaten Pangandaran. *Farmers: Journal of Community Services*, 3(1), 6-10. <https://doi.org/10.24198/fjcs.v3i1.37791>
- Aziz, B. (2025). Pengelolaan Perikanan Berbasis Komunitas dan Partisipasi Masyarakat. In *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ekosistem* (pp. 80–88). Ikatan Penerbit Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/391484815_Pengelolaan_Perikanan_Berbasis_Komunitas_dan_Partisipasi_Masyarakat
- Fitriani, A., & Sahayati, S. (2023). Pelatihan penggunaan KoboToolbox sebagai media pengambilan data survei pada mahasiswa tugas akhir Prodi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, FIKES, UNRIYO. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (ABDISEMAR)*, 2(1).
- Badan Pusat Statistik KKP. 2021. Statistik Produksi Perikanan: Badan Pusat Statistik
- House, J., Kleiber, D., Steenbergen, DJ., Stacey, N. 2022. Participatory Monitoring in Community-Based Fisheries Management Through a Gender Lens. *Journal of the Coastal and Estuarine Research Federation*. *Ambio* 52 : 300-318. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01783-3>
- Karyaningsih, D. Fernando, D., Sugiyarta, A. 2025. Pendekatan Partisipatif Dalam Pemetaan Usaha Perikanan untuk Mendukung Tata Kelola Perikanan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasional*. 5(1). <https://doi.org/10.22441/pemanas.v5i1.34154>

- Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/278315/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-55-tahun-2>
- Pertiwi, T. S., Muda, C. A. K., & Elistia. (2020). Pencatatan hasil data pemeriksaan kesehatan (pengukuran tensi) dengan menggunakan aplikasi KoboCollect. *Jurnal Abdimas*, 6(2).
- Normina, H. 2014. Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22), 107-115. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>
- Nunes, MUS., Cardoso, OR., Silvano, RAM., Favaro, LF. 2021. Participatory Mapping And Fishers' Knowledge About Fish And Shrimp Migration In A Subtropical Coastal Ecosystem. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*. 258(5). <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107412>
- Sari, D. P., Azmiardi, A., Nurbaya, F., Maharani, N. E., et al. (2023). Pelatihan dan pendampingan pengumpulan data kesehatan dengan metode Open Data Kit (ODK) berbasis mobile data collecting using Android application Kobo Toolbox. *Journal of Community Engagement in Health*, 6(1), 4–11. <https://doi.org/10.30994/jceh.v6i1.400>
- Suhelmi IR, Yulius, Purbani D. 2013. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan Memanfaatkan WebGIS. *Depik*. 2(2):70-75. <https://doi.org/10.13170/depik.2.2.724>
- Sukarman., Ellys, R., & Tety, T. 2023. Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Gas LPG Non-Subsidi Di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9464-9478. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5869/5204>
- Yulianto, I., Kartawijaya, T., Rafandi, M. T., Agustina, S., Pingkan, J., Aminollah, Nurjamil, Sabariyono, Widodo, Ramadhan, S., & Hilyana, S. (2016). Profil Perikanan Tangkap di Teluk Saleh dan Teluk Cempi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Wildlife Conservation Society Indonesia. Bogor. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35849.26720>